

Mengkaji Ulang Pola Pemberdayaan Suku Anak Dalam Di Provinsi Jambi

Fikri Surya Pratama

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Corresponding Author: fikrisurya28@gmail.com

Abstract: Various kinds of empowerment programs for the Suku Anak Dalam have been carried out. This empowerment involves various parties such as the government, the Anak Dalam Tribe caring community, religious da'wah groups, and private companies engaged in oil palm plantations. Some empowerment programs are seen as having a suboptimal impact in terms of sustainability. Therefore, this paper aims to review what causes the results of this empowerment program to be not optimal, and how to solve them. This research is qualitative in nature with analytical reporting. Methods of data collection by interviews with two informants and observations, where the sources of data that have been collected, then analyzed with an anthropology approach, reduced by comparing data with each other, then presented and conclusions drawn. The results of this study are realizing how important it is to disseminate information regarding the progress and development of SAD life in society. It is the duty of the government, NGOs, educational institutions to disseminate information, not just material knowledge, but an injection of affection. This is intended to create an emotional connection from people outside the Anak Dalam Tribe to find out how life for SAD will improve if empowered together, as well as to minimize the negative connotations and treatment that apply to SAD so far. By strengthening the roots of knowledge and affection for each other's sensitivity to issues, and willing to work together for mutual tolerance and hand in hand, the empowerment program can run well and be sustainable in the long term. The empowerment program must also pay attention to the locality and participatory aspects of the Anak Dalam tribe itself. In the past the focus was on physical development, the later stages of empowerment are on psychological empowerment and soft skills and hard skills.

Keywords: Anak Dalam Tribe; Empowerment; Jambi.

Abstrak: Berbagai macam program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam sudah dilakukan. Pemberdayaan ini melibatkan berbagai macam pihak seperti pemerintah, komunitas peduli Suku Anak Dalam, kelompok dakwah agama, serta perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Beberapa program pemberdayaan dilihat memiliki dampak tidak maksimal dalam hal kesinambungan. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ulang apa yang menjadi penyebab tidak maksimalnya hasil program pemberdayaan ini, dan bagaimana solusi atasnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pelaporannya bersifat analitis. Metode pengumpulan data dengan wawancara dua informan dan observasi, dimana sumber data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan pendekatan antropologi, direduksi dengan melakukan perbandingan data satu sama lain, kemudian disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah menyadari betapa pentingnya penyebaran informasi mengenai kemajuan dan perkembangan kehidupan SAD pada masyarakat. Sudah menjadi tugas pemerintah, LSM, lembaga pendidikan untuk menyebarkan informasi bukan sekedar materi pengetahuan saja, namun suntikan afeksi. Hal ini ditujukan agar terciptanya suatu hubungan emosional dari masyarakat luar Suku Anak Dalam untuk tahu bagaimana kehidupan SAD yang akan membaik jika diberdayakan bersama, serta untuk meminimalisir konotasi dan perlakuan negatif yang berlaku pada SAD selama ini. Dengan dikuatkannya akar pengetahuan dan afeksi untuk sensitif persoalan satu sama lain, dan mau bekerja sama untuk saling toleransi dan bahu-membahu, maka program pemberdayaan dapat berjalan baik dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Program pemberdayaan juga harus memperhatikan aspek lokalitas dan partisipatif dari Suku Anak Dalam itu sendiri. Jika dahulu difokuskan pada pembangunan fisik, maka pemberdayaan tahap lanjut adalah pada pemberdayaan psikologi dan *soft skill* dan *hard skill*.

Kata Kunci: Jambi; Pemberdayaan; Suku Anak Dalam.

History Article: Submitted 13 January 2023 | Revised 04 May 2023 | Accepted 29 May 2023

How to Cite: Pratama, F. Surya. (2023). *Mengkaji Ulang Pola Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 11 (1), pp. 40–53. DOI: <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.14498>



© the Author(s) 2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi berbagai macam suku yang mendiaminya, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Keragaman ini tentu akan membawa pada kekayaan kearifan lokal. Tak lepas pula, keragaman ini menjadi sebuah tantangan oleh pemerintah dalam membangun dan memberdayakan warganya yang beragam dan memiliki pola hidup yang unik dengan kearifannya masing-masing. Kalimat ini merujuk pada adanya sebuah komunitas yang masih tinggal dikawasan hutan atau komunitas yang memiliki pola hidup nomaden, mereka disebut pemerintah sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Komunitas Adat Terpececil (KAT) yang akan menjadi fokus pada penelitian ini yakni Suku Anak Dalam (SAD). KAT biasanya memiliki pola hidup yang relatif memisahkan diri dari khalayak ramai (berkumpul di hutan), belum semua terjamah oleh pembangunan daerah, nomaden atau ada yang menetap di daerahnya dalam waktu yang lama dan diwarnai adat dan kearifan lokal masing-masing, dimana budaya ini diturunkan dari generasi ke generasi (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2017). Pada umumnya, pola hidup seperti KAT ini termasuk SAD, memiliki sikap yang teguh dengan adat istiadatnya, tertutup dan selektif dengan budaya dari luar kelompoknya (Koespramoedyo, Nuami, Pratiwi, Wardani, Gautama, & Hidayah, 2004).

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah nasional dan daerah melakukan berbagai macam program pemberdayaan pada kelompok KAT ini, dengan tujuan pemerataan pembangunan, mengejar ketertinggalan mereka dalam kehidupan modernisasi peradaban, serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti, program pemberdayaan terhadap KAT, dalam hal ini Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, juga melibatkan LSM, organisasi dakwah, serta perusahaan swasta yang berinteraksi dengan pemukiman Suku Anak Dalam. Walau dalam hasilnya, masih belum memiliki dampak yang maksimal.

Pemberdayaan KAT menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. Strategi dalam pemberdayaan merupakan suatu cara dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada dalam menghadapi kelemahan serta tantangan dalam memberdayakan KAT (Mayliza & Adiarto, 2019).

Istilah pemberdayaan sudah menjadi pembahasan publik, serta sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan dan kemajuan dalam program pembangunan suatu masyarakat (Huraerah, 2011). Proses pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan (Wrihatnolo, 2007); 1) Pada tahap penyadaran, masyarakat diberikan sosialisasi, pengetahuan atau wawasan agar mereka memahami bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam kasus pemberdayaan SAD, harus diadakan usaha penyadaran untuk mengurangi rasa ketergantungan pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Langkah yang digunakan bisa dibuat dengan pembuatan tempat tinggal serta sosialisasi kepada masyarakat awam dan kelompok SAD agar berinteraksi dengan baik; 2) Tahap pengkapasitasan adalah tahap pemberian daya atau kuasa, pihak pemberdaya memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelatihan kepada SAD untuk memenuhi kebutuhan primer mereka diluar berburu saja; 3) Tahap pendayaan adalah tahap dimana masyarakat yang akan diberdaya diberikan daya, peluang, atau otoritas sesuai dengan kecakapan yang telah dimiliki oleh masyarakat selaku penerima daya (Syahrowi, Karni, & Sulastri, 2021).

Pemberdayaan tidak hanya dalam fisik saja, tapi juga non fisik, baik proses maupun tujuan, baik duniawi maupun rohaniah, serta pada ranah perubahan sosial kemasyarakatan (Budiman, 1995). Program pemberdayaan ini harus memeperhatikan karakteristik kehidupan Komunitas Adat Terpencil. Para pihak pemberdayaan harus memiliki strategi secara psikologi untuk mendekati mereka yang hidup dengan sifat tertutup dan "malu" dengan kehidupan orang luar. Pihak pemberdaya harus mencari strategi jitu untuk menciptakan inovasi *hard skill* dan *soft skill* mereka dalam kehidupan, yang selama ini identik hidup dengan peralatan sederhana dan bergantung dengan apa yang disediakan alam.



Pihak pemberdaya juga harus memperhatikan kemudahan akses mereka dalam memenuhi hak pada bidang sipil, kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama dan politik.

Kehidupan Suku Anak Dalam dikenal dengan kehidupan mereka yang nomaden dalam tradisi *melangun*. *Melangun* sendiri dilakukan dengan beberapa faktor, diantaranya: 1) pergantian musim; 2) ketersediaan bahan makanan yang mulai menipis di lokasi mereka menetap; 3) dikarenakan adanya anggota kelompok yang meninggal, sehingga tempat itu tidak baik lagi untuk ditinggali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996). Pada perkembangan selanjutnya, alasan *melangun* semakin kompleks dengan perpindahan yang disebabkan konflik, baik menghindari penjajah Belanda, konflik antar kelompok Suku Anak Dalam lainnya, maupun dengan warga di luar komunitas ini (Pratama & Auliahadi, 2019). Berangkat dari hal ini, tentu langkah pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah dan pihak terkait adalah mengupayakan lokasi yang legal dan bisa dijadikan kelompok SAD untuk menetap. Karena program pemberdayaan akan sulit bahkan tidak bisa dilaksanakan pada masyarakat yang nomaden, sehingga syarat utama program pemberdayaan KAT ini adalah tersedianya tempat menetap yang legal, aman dan nyaman secara fisik dan psikis bagi KAT.

Tak dapat dipungkiri, kehidupan komunitas SAD dapat dikategorikan dalam masyarakat yang kurang dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Dijelaskan Giyarsih (Giyarsih, 2014), penyebab kemiskinan pada masyarakat terpencil dikarenakan kurangnya sumber daya alam¹, sumber daya manusia yang berkualitas², aspek fisik³, aspek finansial⁴ dan aspek sosial⁵. Aspek-aspek ini sangat penting untuk dikaji dan dicari solusi dalam pemberdayaannya. Pada kasus Suku Anak Dalam, sekarang tidak semua mereka berpusat untuk tinggal di pedalaman hutan, mereka masih tinggal di hutan-hutan (umumnya sawit) namun tidak begitu jauh dari jalan utama kota dan desa. Sehingga fokus pemberdayaan harus ditekankan pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang sebagaimana disebutkan oleh Giyarsih, serta bagaimana mempertahankan pemberdayaan yang telah diberikan secara psikis dan fisik.

Dalam pembangunan suatu masyarakat, terdapat suatu teori yang dapat membantu untuk membuat landasan program pemberdayaan, yakni 'Teori Pembangunan Humanitis'. Pendekatan ini menawarkan sebuah solusi pemberdayaan secara menyeluruh demi tercapainya pembangunan yang baik, dimulai dari pemberdayaan lembaga sosial, lingkungan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan dari masyarakat yang akan diberdayakan. Pemberdayaan harus menyelesaikan persoalan sikap yang selalu bergantung pada alam dan menerima nasib (fatalisme) sebagaimana yang telah lama dipraktikkan Suku Anak Dalam (Tamburaka, 1999). Melihat indikator ini, semuanya bisa kita kaitkan pada gaya hidup Suku Anak Dalam yang sangat bergantung pada kekayaan alam hutan.

Penelitian terhadap pemberdayaan pendidikan Suku Anak Dalam pernah dilakukan Eci Trindika Aulia "Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi" (Aulia, 2020), menjelaskan persoalan yang menghambat pemberdayaan aspek pendidikan pada Suku Anak Dalam, yakni persoalan akses jalan menuju pemukiman SAD yang sulit, kekurangan fasilitas yang memadai, kurangnya tenaga kerja pendidik, serta kurangnya peningkatan motivasi untuk mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya penelitian berjudul "Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi"

¹ Kurangnya sumber daya alam pada persoalan ini bisa dikaitkan dengan keterbatasan bahan makanan yang bisa diburu dan diramu oleh Suku Anak Dalam di hutan-hutan. Karena salah satu alasan *melangun* adalah habisnya sumber makanan di tempat mereka tinggal. Ditambah dengan meluasnya lahan sawit dari tahun ke tahun di Provinsi Jambi, tentu juga mempengaruhi kondisi geografis dan biologis lahan perburuan mereka.

² Hal ini lebih dimaksudkan kepada kualitas sumber daya manusia, dalam aspek: pendidikan dan pengetahuan, keterampilan, derajat kesehatan, penguasaan teknologi yang relatif rendah.

³ Hal ini merujuk pada ketersediaan sarana prasarana infrastruktur pembangunan dan pemudah akses mereka menuju pemukiman luar komunitas mereka. Bisa juga akses berupa jalan, jaringan listrik dan jaringan komunikasi.

⁴ Aspek ini sebenarnya sangat berkaitan dengan aspek pertama yakni persoalan berburu dan tempat tinggal. Pada umumnya pekerjaan utama kelompok SAD adalah berburu hewan di hutan, terutama babi hutan. Keuangan mereka umumnya datang dari hasil penjualan buru babi ini.

⁵ Hal ini merujuk pada rasa tertutup mereka (sebagian) pada dunia luar. Namun sekarang sudah banyak dari mereka yang berinteraksi dengan komunitas di luar kelompok mereka, seperti belanja kebutuhan hidup di pasar, mengurus administrasi sipil, dan lain sebagainya.

(Astarika, Partini, & Sulastri, 2018), menjelaskan resistensi program pemberdayaan pemukiman Suku Anak Dalam di Jambi disebabkan adanya perbedaan persepsi pihak pemberdaya dan yang diberdayakan. Perbedaan ini disebabkan kurangnya komunikasi dan sinkronisasi program pemberdayaan dengan kaidah budaya adat lokal masyarakat Suku Anak Dalam. Serta tindakan lanjut pemberdayaan SAD pasca pemukiman juga kurang dimaksimalkan, karena setelah bermukim menetap, tentu masalah baru lainnya akan muncul terutama dalam hal mata pencaharian hidup.

Karenanya, perlu tindakan dari pihak pemberdaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama mengatasi indikator permasalahan ini. Berdasarkan dari penjabaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas apa yang menyebabkan lambatnya *progress* pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam. Serta, mencoba menawarkan langkah-langkah yang perlu dibenahi dalam menyelesaikan persoalan pemberdayaan tersebut.

Metode

Penelitian ini berjenis kualitatif, dimana model penelitian ini bertujuan untuk memahami simbol-simbol dan perilaku yang terjadi di masyarakat, lebih menekankan makna daripada generalisasi, sehingga peneliti harus hadir langsung dilapangan selama penelitian untuk memecahkan persoalan yang ada (Nusa, 2012; Sedarmayanti, 2011). Karakteristik penelitian kualitatif adalah berusaha mengungkapkan berbagai macam keunikan pada individu, kelompok, masyarakat atau organisasi secara menyeluruh, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Basrowi & Suwandi, 2008). Penelitian menggunakan pendekatan sosial antropologi untuk memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil seperti Suku Anak Dalam.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teruntuk wawancara dilakukan secara mendalam, dimana wawancara ini bertujuan mencari dan menganalisis informasi informan, dilakukan secara informal agar lebih rileks, dan masing-masing informan dipisahkan dari informan lainnya agar informasi yang didapatkan lebih akurat (Patton, 1983). Informan yang diwawancarai adalah pihak Kasi Suku Anak Dalam Dinas Sosial Kabupaten Merangin, serta *Tumenggung* Suku Anak Dalam. Sumber data juga berasal dari sumber kepustakaan berupa literasi tulisan pengkaji budaya asal Belanda mengenai Suku Anak Dalam pada masa penjajahan Belanda di Nusantara, yang didapatkan pada situs KITLV Leiden. Untuk mengkaji isu kontemporer mengenai Suku Anak Dalam setelahnya, penulis melakukan penelusuran lewat literasi ilmiah pada artikel journal dan buku yang menjelaskan perihal Suku Anak Dalam. Proses analisis data sudah dilakukan sejak pengumpulan sumber, dimana sumber data penelitian dikritik kekuatan dan relevansinya dengan persoalan penelitian, dibandingkan kekuatan sumber data satu sama lain, yang kemudian dianalisis dengan cara triangulasi data dengan menggunakan pendekatan antropologi (Sutopo, 2006). Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari manusia. Merupakan suatu integrasi dari berbagai ilmu yang masing-masing mempelajari suatu kelompok masalah-masalah khusus mengenai mempelajari suatu kompleks masalah-masalah khusus mengenai kehidupan manusia (Koetjaraningrat, 1987). Tahap akhir ialah menarik kesimpulan dan menyalinnya dalam bentuk jurnal penelitian ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa peneliti terhadap observasi lapangan dan sumber data kepustakaan yang ada, pola pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam memiliki persoalan yang memiliki dampak yang cukup beragam. *Pertama*, yang berasal dari internal Suku Anak Dalam itu sendiri, persoalan pada sisi psikologis Suku Anak Dalam itu sendiri pasca pemberdayaan, dimana mereka timbul rasa tidak mandiri; *Kedua*, warga luar komunitas Suku Anak Dalam, yang belum memahami budaya dan perkembangan pemberdayaan, serta rendahnya rasa kebersamaan dalam keragaman; *Ketiga*, implementasi program pemberdayaan yang belum maksimal. Ketiga hal ini juga bisa menimbulkan persoalan atau konflik lainnya jika tidak segera dilakukan evaluasi kedepannya.

Kehidupan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi sendiri juga diwarnai adanya konflik antara kelompok Suku Anak Dalam dengan warga di sekitaran lokasi menetap dan pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015, konflik antara komunitas Suku Anak Dalam dengan warga Desa Kungkai di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Diceritakan bahwasannya konflik terjadi dikarenakan adanya "konfrontasi" oleh warga Desa Kungkai yang diketahui terkena gangguan mental, meludah di depan salah satu anggota Suku Anak Dalam di Kungkai. Kelompok SAD

tidak menerima perlakuan ini, dan membalas dengan kekerasan fisik pada warga tersebut. Hal ini tentu menimbulkan reaksi dari warga Kungkai dan melakukan serangan balik pada kelompok SAD. Pertikaian ini menimbulkan 1 korban jiwa dan 1 korban luka di pihak warga Desa Kungkai. Warga yang tak terima membalas dengan membakar motor dan pondok-pondok Suku Anak Dalam di Desa Kungkai. Dilansir oleh Bupati Merangin saat itu yakni Haris, ini adalah konflik ketiga dalam lima tahun terakhir antara SAD dengan warga Kungkai. Pemerintah Daerah Merangin mencari solusi dengan membuat rumah-rumah SAD di dalam hutan dan tidak efektif lagi untuk membuat rumah SAD di dekat pemukiman warga desa (Bakhori, 2015).

Memahami konflik yang terjadi di Kungkai ini bisa jadi karena adanya pengaruh dari "label sosial" yang selama ini sudah melekat pada beberapa masyarakat Provinsi Jambi, dimana mereka menganggap Suku Anak Dalam adalah kelompok yang kumuh, terbelakang, dan pendatang di lahan kampung mereka. Berdasarkan pengalaman peneliti sewaktu hidup di Provinsi Jambi, ada beberapa *gesture* yang harus dijaga (jangan sampai dilakukan), oleh masyarakat luar Suku Anak Dalam ketika bertemu atau berinteraksi dengan Suku Anak Dalam, seperti meludah, menutup hidung, atau memasang ekspresi yang merendahkan. Hal-hal tersebut dapat menyinggung perasaan komunitas tersebut. Hal ini diperparah dengan banyak *stereotype* yang kurang enak dari masyarakat awam untuk mengajarkan anak-anaknya agar berhati-hati untuk bergaul dengan komunitas Suku Anak Dalam.

Upaya Baru dalam Pembangunan Sisi Fisik: Penyediaan Ruang Khusus Pemukiman dan Sarana Prasarana Untuk SAD, Serta Implementasi Pelatihan Keterampilan Di Luar Berburu

1. Penyediaan Lahan Tempat Tinggal

Pemberdayaan Suku Anak Dalam harus diawali dengan kepastian lokasi lahan atau tanah yang bisa mereka huni dengan nyaman dan aman. Persoalan tempat tinggal adalah masalah rumit yang dialami SAD yang dimulai sejak pembangunan besar-besaran secara nasional pada masa Orde Baru hingga kontemporer ini. Masa Orde Baru diwarnai dengan pembukaan hutan yang menjadi lintasan *melangun* SAD, tujuannya yaitu: untuk kepentingan pembangunan dan pembukaan bisnis perkebunan, terutama sawit dan karet oleh negara dan swasta; transmigrasi; hingga ranah bisnis perikanan (HPH). Praktik pembukaan dan perubahan fungsi hutan ini menyebabkan mengecilnya spasial pergerakan SAD dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau *melangun*, dimana mereka juga tidak punya kuasa untuk mengkalim hak atas tanah-tanah yang mereka yakini sebagai tanah yang diwarisi leluhur untuk mereka tersebut (Baskoro, 2014). Problema yang ditimbulkan adalah sulitnya mereka dalam mencari makanan dan berburu di hutan, karena selama ini mereka sangat bergantung dengan apa yang disediakan alam.

Persoalan konflik tanah tempat tinggal tidak hanya dengan perusahaan sawit saja, namun juga merembes pada transmigran Jawa dan warga lokal lainnya yang kerap mengusir kelompok SAD. Dijelaskan *Tumenggung* Kitab berdasarkan pengalamannya sewaktu ia memimpin kelompoknya dahulu, bagaimana ia dan kelompoknya diusir dari lahan masyarakat karena ketahuan membuat pemukiman di atas tanah yang di klaim milik masyarakat setempat, atau dikarenakan masyarakat yang tidak terima dengan tindakan SAD yang menanam umbi-umbian, pisang, durian atau tanaman lain tanpa sepengetahuan mereka.

Pada kasus kelompok SAD di Mentawak, Kabupaten Merangin, dapat digambarkan betapa besarnya peran perusahaan swasta dan gotong royong masyarakat dalam ikut serta memberdayakan tempat tinggal kelompok SAD, dan hal ini berjalan dengan baik. Rombongan Mentawak I yang dipimpin oleh *Tumenggung* Sikar telah menetap di kawasan Mentawak I pada lahan warga *dusun* Mentawak yang dibeli oleh PT. Sari Aditya Loka. Setelahnya, PT. Sari Aditya Loka bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Merangin membuat rumah-rumah pemukiman permanen untuk kelompok Suku Anak Dalam, dan segera melakukan pemberdayaan pendidikan. Hal ini cukup penting karena menetap dan perbaikan kualitas pendidikan (terutama baca, tulis dan hitung) merupakan sebuah langkah awal pemberdayaan yang penting untuk Suku Anak Dalam. Walau demikian sudah dibuatkan rumah permanen, sebagian warga masih tinggal dalam gubuk sederhana mereka yakni *sudung*, dikarenakan sebagian masih belum terbiasa tinggal dalam bangunan yang tertutup.

Sedangkan untuk rombongan *Tumenggung* Kitab di Mentawak II mulai menetap setelah mendapatkan lahan pemukiman yang dibeli oleh salah satu pegawai UPTD Merangin, Afrizal

dengan luas tanah 1.000 m², dengan bantuan dana juga dari Kecamatan Sungai Ulak. Menetapnya mereka ini telah mengakhiri perjalanan *melangun* dan pengembaraan mereka setelah kerap berpindah-pindah dan terusir oleh masyarakat luar, karena dianggap meresahkan. Berawal dari keluar dari kawasan hutan Taman Nasional Bukit Duabelas, berjalan menuju arah Pamenang, Hitam Ulu hingga ke Kuamang Kuning di Kabupaten Bungo. Kemudian kembali lagi ke arah Kabupaten Merangin di Margoyoso, Tabir, dan akhirnya berakhir di Mentawak pada tahun 2011.



(Sumber: Observasi Langsung di Lapangan)

Gambar 1. *Sudung* Suku Anak Dalam



(Sumber: Observasi Langsung di Lapangan)

Gambar 2. Wanita dan Anak-Anak SAD Wilayah Mentawak, Merangin.

2. Pembangunan Tempat Tinggal dan Upaya Mempertahankannya

Setelah mendapatkan lokasi tempat tinggal. Langkah selanjutnya bagi pihak pemberdaya adalah membangun tempat tinggal berupa rumah. Sebelum memiliki rumah, SAD tinggal dalam sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari kayu, dan beratapkan daun atau terpal plastik yang

mereka namakan *sudung*. Pembangunan rumah-rumah ini tentu akan membuat mereka nyaman dalam istirahat, serta memberikan mereka perlindungan dari panas dan hujan ketika mereka tidur.

Namun, upaya pemberian bantuan tidak hanya sampai disitu saja. Pihak pemberdaya harus mengupayakan bagaimana sosialisasi kerukunan kelompok SAD satu sama lain, maupun paling penting dengan masyarakat luar komunitas mereka yang terdekat dari pemukiman mereka. Karena walau rumah yang bagus sudah berdiri dan siap dihuni, namun jika masih terdapat konflik antara SAD dan warga lain, maka bisa saja kasus-kasus rumah program pemberdayaan untuk SAD yang kosong akibat ditinggal kelompok SAD mengungsi, tentu akan berlanjut (Astarika, 2016). Jadi sosialisasi dan membentuk lingkungan tempat tinggal yang kondusif juga sangat mempengaruhi dalam kelanjutan dan kesinambungan program pemberdayaan dan bantuan berupa rumah tempat tinggal.



(Sumber: Observasi Langsung di Lapangan)

Gambar 3. Rumah-Rumah Permanen Kelompok SAD Wilayah Mentawak, Merangin.



(Sumber: Observasi Langsung di Lapangan)

Gambar 4. Salah Satu Perusahaan Swasta yang Ikut Serta dalam Membantu Pemberdayaan Kelompok SAD Wilayah Mentawak, Merangin.

3. Upaya Pengurusan dan Penguatan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan

Dalam persoalan kependudukan, dijelaskan Azrul Affandi⁶, program pendataan dan pembuatan berkas administrasi kependudukan seperti KTP dan KK sudah dilakukan untuk Suku Anak Dalam sejak tahun 2011 pada masa Bupati Merangin periode itu yakni Nalim. Namun program ini masih tersendat dan baru berjalan lancar sejak tahun 2015 pada masa Bupati Al-Haris. Sehingga pendataan Suku Anak Dalam di kawasan Kabupaten Merangin baru berjalan sejak tahun 2015, dan masih banyak tersebar kelompok SAD yang nomaden namun ingin juga diberdayakan (Affandi, 2019).

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Badan yang sehat merupakan faktor penunjang kemampuan manusia dalam beraktifitas. Pada hasil observasi lapangan, beberapa SAD sudah mulai mengenal cara mengatasi kebersihan badan, seperti sudah tersedianya tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Namun yang perlu dievaluasi lagi adalah, persoalan jangan membuang sampah sembarangan. Dikarenakan sebagian kelompok masih suka membuang sampah dapur, sampah perbelanjaan ke desa/kota terdekat dekat pemukiman rumah mereka. Hal ini tentu akan menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan kedepannya.

Ada beberapa masalah kesehatan yang umum menyerang kelompok SAD, diantaranya kekurangan gizi, muntaber, malaria dan penyakit gatal-gatal. Selain itu, wanita juga cukup rentan dalam eprihal kesehatan selama mengandung hingga tahap melahirkan. Beberapa kelompok SAD memberlakukan aturan adat berupa larangan perempuan SAD bertemu dengan seorang lelaki diluar rumah. Menurut hasil penelitian Ridwan & Lesmana (Ridwan & Lesmana, 2018), terdapat program yang bisa menjadi inovasi kelompok pemberdaya dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat SAD tanpa harus "mengkritik" dan "menyalahkan" adat yang ada, salah satunya yakni program *SAD Care*. *SAD Care* adalah bentuk pelayanan berbasis mobil terpadu yang menggabungkan upaya promotif dan preventif (posyandu dan posbindu), kuratif dan pengobatan tradisional oleh masyarakat SAD berbasis gender. *SAD care* bisa digunakan sebagai fasilitas pelayanan Tingkat Pertama (FKTP). Pemerintah Daerah agar mengalokasikan Anggaran dengan menyediakan mobil Bus sebagai pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memudahkan masyarakat jika harus dirujuk menggunakan kartu BPJS.



(Sumber: Observasi Langsung di Lapangan)

Gambar 5. Posyandu di Salah Satu Pemukiman Kelompok SAD Wilayah Mentawak, Merangin

⁶ Kasi Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Selain itu, solusi biaya pengobatan SAD bisa diatasi lewat program Jamkesda. Namun untuk mendapatkan Jamkesda, terlebih dahulu SAD harus dibina mendapatkan NIK hingga KTP dan KK. Jika mereka sudah menyelesaikan persoalan administrasi sipil tersebut, maka mereka bisa mengurus bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sudah terjalin berbagai kersama antarpihak sejak September 2018 yakni BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Merangin, untuk menanggung semua biaya pengobatan Suku Anak Dalam yang sudah memiliki data NIK pada Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), kemudian kepada BPJS. Bagi warga SAD yang belum memiliki data NIK akan diproses lebih lanjut, karena NIK sangat penting untuk membuka peluang mendapat bantuan sosial lainnya (Pratama & Auliahadi, 2022). Berdasarkan hal ini, kecepatan dan ketepatan dalam pengurusan administrasi sipil juga sangat mempengaruhi tersalurkan program-program bantuan dan pemberdayaan terhadap SAD, terlebih dalam aspek kesehatan.

4. Upaya Mengaktifkan Komunitas SAD dalam Program Pemberdayaan

Globalisasi dan modernisasi merupakan proses perkembangan peradaban yang tidak dapat dihentikan, maka kita harus mengikuti, dan beradaptasi. Adapun untuk kelompok KAT, mereka bisa beradaptasi pada kondisi ini, tanpa takut kehilangan sebagian besar tradisi asli kearifan mereka. Salah satu upaya nyata pemerintah adalah menjadikan kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) menjadi kawasan nasional dan kawasan yang bisa dihuni kelompok-kelompok SAD untuk menjalankan kehidupan tradisional mereka, dalam hutan lindung nasional, tentunya tetap mendapatkan perhatian dan pemberdayaan.

Pemberdayaan kelompok SAD di kawasan TNBD sendiri melibatkan kolaborasi banyak pihak. Seperti yang dilakukan Universitas Jambi, dimana mereka mempunyai Laboratorium Sosial SAD melalui gagasan DLT, PUI Etnomedical dan Nurisetikal (eMedical) dan PUI Pendidikan Komunitas (PENTAS). Program ini melibatkan dosen dan mahasiswa, dimana kegiatan ini dikenakan 20 SKS dalam kegiatan akademik. Pengintegrasian program pemberdayaan ini juga melibatkan kontribusi pemerintah desa setempat, serta dibuatkan fasilitas registrasi bagi SAD dan diskusi kelompok serumpun. Pihak pemberdaya juga mengupayakan pemberdayaan pertanian tanaman obat di kawasan TNBD serta pemberdayaan beasiswa pendidikan bagi SAD di TNBD. Pada tahun 2021, tercatat sudah 2 orang SAD yang berkuliah di Universitas Jambi (Indriani, 2021).

Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok SAD yang tidak tinggal di kawasan TNBD? Program pemberdayaan harus bisa melibatkan kelompok SAD itu sendiri, agar mereka bisa hidup di kawasan yang dekat dengan kehidupan masyarakat luar komunitas mereka, namun mereka juga bisa mempertahankan sistem nilai budaya mereka, walau tidak tinggal di hutan lindung atau di pedalaman hutan.

Persoalannya, dalam pemberdayaan SAD selama ini di Provinsi Jambi, ada beberapa kendala komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Idris (Idris, 2017): 1) komunikasi pihak pemberdaya terhadap SAD yang terlalu *top down*, hal ini mengakibatkan informasi yang diberikan kurang difahami oleh penerima, serta memperbesar kegagalan program pemberdayaan untuk jangka waktu panjang, akibat terabaikannya SAD itu sendiri (MY & Kusnadi, 2010). Sehingga komunikasi yang partisipatif harus lebih diutamakan ketimbang pendekatan teknis (Hadiyanto, 2009); 2) Program pemberdayaan lebih cenderung fisik, padahal pendekatan mental dan psikis juga perlu dilakukan, hal ini bisa juga dipengaruhi masih banyak sentimen negatif masyarakat luar terhadap SAD; 3) komunikasi yang kurang lancar antara kelompok SAD dan masyarakat sekitar dikarenakan belum saling memahami satu sama lain, sehingga sangat diperlukan sosialisasi komunikasi lintas budaya.

Berkaca dari persoalan pola komunikasi ini, maka pihak pemberdaya jangan sampai terjebak dalam arus Modernisasi yang radikal. Teori modernisasi melihat tradisi masyarakat sebagai faktor penghambat yang harus di eliminasi dengan pola pikir yang lebih rasional. Dijelaskan oleh Arief Budiman, teori modernisasi yang populer di negara berkembang banyak yang tidak menimbangakan keterlibatan kearifan budaya lokal sebagai potensi pemberdayaan dan pembangunan (Budiman, 1995).

Maka, seperti yang dijelaskan Rinaldi, perlu adanya kerjasama antar pihak pemberdaya dan kelompok SAD untuk berunding, program-program seperti apa yang dapat memberdayakan mereka, tanpa meninggalkan sistem budaya mereka. Karena dalam otonomi daerah sendiri memiliki gagasan, dimana pentingnya mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan. Sehingga dalam hal ini, kelompok SAD berperan sebagai aktor dan partisipan yang aktif, sedangkan negara sebagai fasilitator yang menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan SAD. Dalam hal ini, SAD harus bisa memotivasi dirinya untuk bersikap kritis demi pemberdayaan kelompok mereka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sikap kritis ini bisa ditumbuhkan dengan perbaikan kualitas pendidikan formasi dan formal pada komunitas SAD (Kerinci Time, 2013). Maka pola pemberdayaan yang berbasis kultural ekologis, bisa dijadikan pedoman dalam pemberdayaan Suku Anak Dalam, dikarenakan didasarkan pada kearifan adat lokal (Astarika, 2017).

5. Upaya Pemberdayaan Kemampuan Pekerjaan Selain Berburu.

Setelah disinggung sebelumnya, SAD memiliki tradisi *melangun* dan penghidupannya sangat bergantung dengan apa yang sediakan hutan untuk mereka (berburu dan meramu). Kondisi hutan di Provinsi Jambi yang semakin tergerus dengan pertumbuhan lahan sawit juga membawa tantangan kehidupan yang baru bagi kelompok SAD. Dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan Idris (Idris, 2017), beberapa pengusaha lahan sawit mau menerima kelompok SAD dan mereka diberdayakan untuk tinggal dalam kawasan perkebunan itu, dan beberapa kelompok diberikan lahan perkebunan sawit yang siap panen, sebagai pekerjaan mereka selain berburu. Namun setelah panen pertama, dikarenakan mereka tidak punya pengetahuan dan pengalaman mengolah tanaman sawit, akhirnya mereka menjual lahan sawit mereka pada pembeli dengan harga yang murah. Hasil jual kebun mereka pergunakan dengan kebutuhan yang konsumtif.

Di kasus lain, beberapa komunitas SAD merasa tidak "percaya" dengan keberhasilan program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini dikarenakan dengan apa yang mereka lihat di lapangan, bahwasannya mereka dibuatkan perumahan yang sudah mendekati perkampungan desa/kota dan diberi arahan untuk berbaur hidup di kota, namun mereka juga melihat banyak kegiatan penebangan hutan oleh masyarakat luar. Komunitas SAD yang merasa "ditipu" oleh program ini pada akhirnya juga nekad untuk kembali ke hutan dan kembali pada kebiasaan berburu. Dikarenakan jika mereka dibatasi untuk beraktifitas di dalam hutan, kenapa "Orang-Orang Terang" tidak dibatasi pergerakannya di hutan? (Astarika, 2016).

Oleh karenanya perlu adanya kebijakan pemberdayaan yang tidak hanya bersifat instan, seperti pemberian rumah, pemberian kolam ikan, pemberian lahan sawit dan lain sebagainya. Namun perlu juga pembinaan psikologis untuk merubah pola pikir SAD agar tidak selalu bergantung pada alam, serta diberikan pelatihan pekerjaan diluar berburu, seperti berdagang, budidaya ikan atau budidaya pertanian tanaman apapun agar mereka memiliki *skill* di pekerjaan selain berburu, dan dampaknya bisa terasa dan berkelanjutan.

Upaya Baru Dalam Pembangunan Sisi Psikis: Sosialisasi Mengenai Sejarah, Identitas dan Perkembangan Pemberdayaan Kehidupan SAD pada Masyarakat Luar Komunitas SAD

Identitas sosial memang sangat mempengaruhi bagaimana setiap manusia saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Salah satu komponen penting adalah nama, yang berkaitan dengan bagaimana individu/kelompok saling memanggil satu sama lain. Nama berfungsi sebagai representasi budaya masyarakat tertentu. Tak jarang dalam dinamika perkembangan kehidupan suatu bangsa, konflik antar individu atau kelompok bisa dipicu melalui identitas sosial, yang disebabkan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam menyaring informasi. Konsekuensi yang ditimbulkan bisa berupa pertikaian dua kultur yang berbeda.

Dinamika perubahan nama pada kelompok Suku Anak Dalam juga tak berjalan mulus. Mereka sempat mengalami krisis kepercayaan diri dengan nama yang disematkan pada mereka. Sebelum lahir istilah Suku Anak Dalam, mereka dikenal sebagai kelompok Suku Kubu. Nama Kubu sendiri dalam catatan-catatan antropolog Belanda saat menjajah Nusantara, seperti Van Dongen⁷, menyebutkan orang-orang Kubu adalah masyarakat yang tidak menyukai pekerjaan yang diatur oleh pihak Belanda, sulit diatur, sering mengembara dan meramu makanan di hutan. Hal ini membuat Kubu sulit untuk diatur oleh pemerintah kolonial, dan sangat jarang ditemukan orang-orang Kubu yang menjadi atau menawarkan diri menjadi buruh, menjadi kuli di perusahaan atau perkebunan Belanda (Jauhari & Said, 2012). Konotasi nama Kubu yang selalu dikaitkan dengan variabel yang negatif menimbulkan

⁷ Van Dongen adalah akdemisi Belanda masa kolonial di Indonesia yang memiliki karya penelitian pada tema suku-suku pedalaman. Seperti karyanya yang berjudul "Orang Koeboe" yang diterbitkan pada tahun 1906.

ketidaknyamanan mereka secara psikis. Bagi mereka, istilah Kubu oleh "Orang Terang" adalah sebutan yang membuat mereka terlihat bodoh, kumuh, tak berpakaian, terbelakang dan acuh tak acuh.



(Sumber: Observasi Langsung di Lapangan)

Gambar 6. Sekolah Raja Nasar: Sekolah Non-Formal Kelompok SAD Wilayah Mentawak, Merangin.



(Sumber: Observasi Langsung di Lapangan)

Gambar 7. Musholla Kelompok SAD Wilayah Pematang Kabau, Air Hitam, Sarolangun.

Beberapa masyarakat kontemporer masih banyak yang menganggap SAD masih tertinggal dan berpakaian minim. Dijelaskan oleh salah satu mantan *tumenggung*⁸ dan tetua di komunitas SAD Mentawak, yakni Kitab, dahulu mereka memang hanya menutup kemaluan mereka dengan kain, hingga memasuki masa Orde Baru, dimana Indonesia sedang gencar dalam masa pembangunan. Orde Baru membawa besar dalam hal interaksi SAD dengan kehidupan luar komunitas mereka. SAD lambat laun berinteraksi dengan masyarakat luar, dan mulai memakai pakaian sebagaimana masyarakat luar komunitas mereka (Kitab, 2018). Hal ini menunjukkan bentuk adaptasi pertama mereka dengan perkembangan masyarakat pada masa Orde Baru. Sehingga tidak tepat bagi masyarakat yang masih mempunyai pemikiran, kelompok SAD adalah kelompok yang berpakaian minim. Untuk meluruskan hal ini, maka sangat penting adanya sosialisasi untuk masyarakat secara umum, terutama kerjasama lembaga pemberdaya SAD dengan instansi pendidikan.

Suku Anak Dalam juga mempunyai sejarah panjang terkait nama sebagai penentu identitas mereka dari kacamata masyarakat luar. Mulai dari Kubu, Orang Rimba hingga Suku Anak Dalam. Nama Suku Anak Dalam yang dipakai dalam penelitian ini merupakan sebuah nama yang dipopulerkan oleh Departemen Sosial sejak tahun 1970 untuk membedakan mereka dengan masyarakat luar yang mereka panggil "Orang Terang" (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2010). Pada perkembangannya, ada beberapa masyarakat yang memiliki *mindset* terbuka dan mau bergaul dengan komunitas SAD. Biasanya mereka akan memanggil satu sama lain dengan panggilan *sanak*, baik dari SAD ke "Orang Terang" yang dekat dengan mereka, dan sebaliknya (Jauhari & Said, 2012). Sebutan *sanak* ini memiliki dampak besar dari sisi psikologis komunitas SAD. Mereka akan merasa dihargai dan akan mendorong mereka untuk terbuka dan berbaur dengan kelompok di luar komunitas mereka.

Orang Kubu dan Suku Anak Dalam, nama-nama ini menunjukkan bagaimana sejarah perubahan mentalitas Suku Anak Dalam dalam menggambarkan sepak terjang identitas sosial mereka sebagai komunitas yang termarjinalkan. Dimana penyebutan-penyebutan ini disesuaikan dengan penyesuaian kebijakan pemerintah yang memberdayakan, maupun dari persepsi komunitas SAD itu sendiri (Tirtosudarmo, 2022). Walau sebenarnya, dari pengalaman peneliti sewaktu tinggal di Provinsi Jambi kurang lebih 10 tahun, komunitas SAD memiliki dua nama dalam memanggil diri mereka sendiri, ada yang memanggil diri mereka SAD, atau ada yang memanggil diri mereka sebagai *Orang Rimbo* (Orang Rimba)⁹. Mereka tidak pernah memanggil diri mereka sendiri sebagai Kubu. Dikarenakan Kubu adalah nama panggilan yang diberikan oleh pihak luar komunitas ini sejak masa Kerajaan Melayu berdiri di Jambi, kolonial Belanda, hingga kontemporer ini.

Melihat persoalan empiris di lapangan, maka perlu langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah, kelompok peduli KAT dan masyarakat awam itu sendiri untuk sosialisasi, dan belajar serta memahami bagaimana sejarah dan perkembangan kehidupan SAD itu sendiri. Pada kontemporer ini, SAD tidak lagi seperti SAD yang dijumpai pada masa penjajahan atau Orde Baru. Sudah banyak kelompok SAD yang menetap, teberdayakan, dan membuka diri dengan gaya hidup pada masyarakat umumnya. Terpenting untuk menanggapi hal ini adalah penyebaran informasi mengenai kemajuan dan perkembangan kehidupan SAD pada masyarakat. Sudah menjadi tugas pemerintah, LSM, lembaga pendidikan untuk menyebarkan informasi bukan sekedar materi pengetahuan saja, namun suntikan afeksi. Hal ini ditujukan agar terciptanya suatu hubungan emosional dari masyarakat luar Suku Anak Dalam untuk tahu bagaimana kehidupan SAD yang akan membaik jika diberdayakan bersama, serta untuk meminimalisir konotasi dan perlakuan negatif yang berlaku pada SAD selama ini. Dengan dikuatkannya akar pengetahuan dan afeksi untuk sensitif persoalan satu sama lain, dan mau bekerja sama untuk saling toleransi dan bahu-membahu, maka program pemberdayaan dapat berjalan baik dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang.

Kesimpulan

Melakukan pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam maupun terhadap Komunitas Adat Terpencil lainnya tidak hanya sebatas pada pemberian bantuan secara fisik. Pemberdayaan harus direncanakan dan dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan. Pemberdayaan tidak hanya mementingkan sebuah laporan hasil akhir kerja pemberian bantuan sahaja, namun bagaimana

⁸ *Tumenggung* adalah istilah pemimpin suku atau kelompok dalam komunitas Suku Anak Dalam.

⁹ Makna sebutan ini menunjukkan pengakuan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaannya yang tidak bisa lepas dari hutan.

pihak pemberdaya berusaha memberikan penyuluhan pada pihak yang diberdaya untuk mempertahankan apa yang telah mereka dapati, dan mengembangkannya. Sehingga program pemberdayaan Suku Anak Dalam yang baik adalah program pemberdayaan yang memiliki dampak jangka panjang lewat program yang berkesinambungan, dan melibatkan aspek-aspek yang sesuai dengan sosial budaya dan adat komunitas Suku Anak Dalam. Pemberdayaan harus dimulai dari meningkatkan kekuatan moral Suku Anak Dalam akan perubahan yang terjadi di lingkungannya, pelatihan *skill* sehingga meninggalkan rasa ketergantungan. Masyarakat sebagai pihak kedua yang selalu berinteraksi dengan Suku Anak Dalam juga harus diberikan penyuluhan mengenai sejarah dan perkembangan kehidupan Suku Anak Dalam yang sekarang jauh dari stigma negatif yang selama ini dibentuk dan diwariskan. Upaya saling mengerti dan memahami kehidupan antar kelompok akan memudahkan terjadinya harmonisasi sosial dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Affandi, A. (2019, Februari 11). wawancara langsung. (F. S. Pratama, Pewawancara)
- Astarika, R. (2016). Konflik Agraria Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi. *INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL TANPA DI SKRIMINASI* (hal. 109-124). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Astarika, R. (2017). Pola Pemberdayaan Kultural Ekologis: Solusi Mengatasi Kerawanan Pangan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Matematika, Sains Dan Teknologi*, 213-222.
- Astarika, R., Partini, P., & Sulastri, E. (2018). Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 7(3), 146-156.
- Aulia, E. T. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Media Sosiologi (JMS)*, 23(1), 14-23.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2010). *Profil Suku Anak Dalam (SAD) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Bakhori, S. (2015, Desember 16). *Suku Anak Dalam Bentrok dengan Warga Jambi, Ini Penyebabnya*. Dipetik Januari 11, 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/728186/suku-anak-dalam-bentrok-dengan-warga-jambi-ini-penyebabnya>
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. (2017). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Berkembang Tanpa Kehilangan Tradisi*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Baskoro, D. (2014). *Resolusi Konflik Agraria (Studi Pada Konflik Masyarakat Suku Anak Dalam dan PT Asiatic Persada)*. Jember: Universitas Jember.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiman, A. (1995). *Teori pembangunan dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Adaptasi Sosial Budaya Masyarakat Kubu Terhadap Perubahan Lingkungan di Jambi*. Jambi: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Jambi.
- Giyarsih, S. R. (2014, Juli). Pengentasan Kemiskinan Yang Komprehensif Di Bagian Wilayah Terluar Indonesia - Kasus Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *JURNAL MANUSIA DAN LINGKUNGAN*, 21(2), 239-246.
- Hadiyanto. (2009, Agustus). Desain Pendekatan Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Peternak Domba Rakyat. *Media Peternakan*, 32(2), 145-154.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian dan Perkembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Idris, N. (2017, Juni). Mengkaji Ulang Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam Di Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 37-48.
- Indriani. (2021, September 22). *Mendikbudristek apresiasi program pemberdayaan Suku Anak Dalam*. Dipetik Januari 12, 2023, dari ANTARA: <https://www.antaraneews.com/berita/2408449/mendikbudristek-apresiasi-program-pemberdayaan-suku-anak-dalam>
- Jauhari, B. V., & Said, A. (2012). *Jejak Peradaban Suku Anak Dalam*. Bangko: Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Suku Anak Dalam.

- Kerinci Time. (2013, Oktober 23). *Upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Suku Anak Dalam Jambi*. Dipetik Januari 12, 2023, dari <http://kerincitime.co.id/upaya-pembinaan-dan-pemberdayaan-suku-anak-dalam-jambi.html>
- Kitab, T. (2018, Maret 31). wawancara langsung. (F. S. Pratama, Pewawancara)
- Koespramoedyo, D., Nuami, M., Pratiwi, S., Wardani, K., Gautama, M., & Hidayah, Z. (2004). *Kajian Perbandingan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengembangan Wilayah Terpadu*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal BAPPENAS.
- Koetjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Mayliza, & Adianto. (2019, Maret). Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 41-46.
- MY, M., & Kusnadi, E. (2010, Oktober). Pembangunan Sosial Masyarakat Terasing di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Masyarakat Suku Anak Dalam di Muaro Jambi. *Media Akademika*, 25(4).
- Nusa, P. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Patton, M. (1983). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Pratama, F. S., & Auliahadi, A. (2019, Juli-Desember). Sejarah Melangun Suku Anak Dalam Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 23(2), 157-167.
- Pratama, F. S., & Auliahadi, A. (2022, Januari). Sejarah Dan Perkembangan Kehidupan Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (2011-2019). *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 14-26.
- Ridwan, M., & Lesmana, O. (2018, September). Model Pemberdayaan Suku Anak dalam Bidang Kesehatan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. *Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ)*, 2(2), 97-103.
- Sedarmayanti. (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Syahrowi, Karni, A., & Sulastri, I. (2021, Januari-Juni). Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer. *JURNAL AL-UTTAIMIYYAH*, 7(1), 1-14.
- Tamburaka, R. E. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Tirtosudarmo, R. (2022). Identitas dan Marjinalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam. *KRITIS*, XXXI(1), 59 – 79.
- Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.